



Membangun JEJARING Alumni

*Universitas Islam Malang,
dari NU untuk Indonesia
dan Peradaban Dunia*

Prof. Dr. H. Maskuri., M.Si. dkk

MEMBANGUN JEJARING ALUMNI

•• ————— ••

*Universitas Islam Malang,
dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia*

Moh. Yamin S.Pd., M.Pd., Dr. Siti Saroh., M. Si. Mohammad
Ainul Yaqin, S.Pd., M.Ed.

Tentu saja dalam buku ini mengandung berbagai kesalahan disana sini mengingat proses pembuatan buku yang mengalami berbagai kendala. Oleh karenanya, kritik dan saran dari para pembaca merupakan "gizi" yang amat kami tunggu.

Malang, 21 Desember 2016

Rektor

Daftar Isi

Pengantar Rektor ... v
Daftar Isi ... vii

**MENABUH GENDERANG KEBANGKITAN
PENDIDIKAN ISLAM : Refleksi dan Cita-Cita Besar Uni-
versitas Islam Malang**

Oleh : Prof. Dr. H. Maskuri., M.Si ... 1

**PENTINGNYA JARINGAN (NETWORKING)
DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI**

Oleh : Noor Shodiq Askandar., SE., MM ... 25

KITA PERLU MEDIA KOMUNIKASI

Oleh: Dr. H. Badat Muwakhid., MP ... 31

NU ITU "RUMAH UNTUK SEMUA"

Oleh: Dr. Abdul Wahid, SH., M.Ag ... 36

**PENEGUHAN JEJARING ALUMNI: INTEGRASI,
SINERGI DAN KOLABORASI BERBASIS
PEMBERDAYAAN**

Oleh: Hayat, S.AP, M.AP ... 46

**MEREBUT MASA DEPAN MELALUI PEMBERDAYAAN
ALUMNI**

Oleh : Ahmad Siboy, SH., MH ... 60

**INVESTASI KEBERLANJUTAN JATI DIRI BANGSA
MELALUI PEMBERDAYAAN PEMUDA
DI KAMPUS KEBANGGAAN NU: MIMPI ALUMNI
UNTUK UNISMA TERCINTA**

Oleh: Muhammad Yunus S.Pd., M.Pd ... 75

**MERETAS JEJARING ALUMNI SEBAGAI KEKUATAN
KOMUNITAS SOSIAL**

Oleh: Mohammad Afifulloh, S.Ag., M.Ag ... 89

**PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN
PADA MAHASISWA ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM
MALANG**

Oleh: Daris Zunaida, S.AB., M.AB ... 98

**SINERGISITAS ALUMNI DAN GERAKAN
KELOMPOK MASYARAKAT MADANI
DALAM MEMBANGUN BANGSA BERDAULAT**

Oleh: Moh. Yamin, S.Pd., M.Pd ... 113

**PRESTASI ALUMNI: Wujud Display dari Sebuah Citra
Perguruan Tinggi**

Oleh: Dr. Siti Saroh, M.Si ... 124

**SEKILAS TENTANG SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI
DI INDONESIA**

Oleh: M. Ainul Yaqin, S.Pd, M.Ed ... 130

**MENABUH GENDERANG
KEBANGKITAN PENDIDIKAN ISLAM**

Refleksi dan Cita-Cita Besar Universitas Islam Malang

Oleh: Prof. Dr. H. Maskuri., M.Si

Pendahuluan

Semua orang yakin bahwa Universitas Islam Malang telah memiliki filosofi pendidikan yang jelas. Bahkan selain jelas, filosofi itu sudah diyakini kebenarannya, bahkan telah diimplementasikan dalam situasi yang nyata walaupun belum sepenuhnya. Perguruan Tinggi Islam (Unisma Malang) yang sudah berumur hampir setengah abad ini memiliki filosofi yang dijadikan pegangan bersama oleh sivitas akademika. Dan filosofi didirikannya Unisma itu sering kali kita dengar dari para pendiri dan tokoh-tokoh di Unisma, oleh karena para pendirinya adalah para ulama', kyai, cendekiawan, dan para tokoh Islam, sehingga belum sampai di terbukukan secara baik. Hadirnya Unisma sebagai perguruan tinggi Islam yang telah didirikan pada 27 Maret 1981 ini karena didorong oleh semangat pengabdian yang tinggi untuk mempersiapkan sumberdaya manusia intelektual yang ulama dan ulama yang intelek, serta keinginan besar untuk berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara.

SEKILAS TENTANG SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Oleh: M. Ainul Yaqin, S.Pd, M.Ed¹⁷

Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia tidak lama. Pendidikan tinggi di Indonesia harus diakui berbasis pada pendidikan kolonial yang segregatif dan primordial yang tidak terlalu menyentuh nilai-nilai akademis ilmiah yang bersandar pada kebebasan akademis (*academic freedom*) dan kebebasan ilmiah (*scientific freedom*). Pengaruh pemerintahan Kolonial Belanda yang primordial memberikan dampak yang formalis dan mengesampingkan tujuan mulia dari pendidikan itu sendiri, sementara pemerintahan Militer Jepang yang tidak peduli pada kualitas pendidikan tinggi melainkan mengeksploitasi pemuda untuk kepentingan militer Jepang, kemudian situasi pemerintahan Sukarno yang serba terbatas membuat kondisi pendidikan tinggi menjadi tidak fokus pada tujuan utamanya, serta karakter pemerintahan Suharto yang sentralistik dan militeristik membuat pengembangan pendidikan tinggi mejadi lebih mementingkan kuantitas dari pada kualitas dan di reformasi, pengembangan pendidikan tinggi masih kurang maksimal menggunakan kekuatannya untuk menjadikan

pendidikan tinggi menjadi lebih berkualitas adalah situasi nyata dari perjalanan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci; *Sejarah, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Kolonial*

Pendidikan Tinggi di Era Kolonialisme Belanda

Pendidikan tinggi di Indonesia tidak memiliki sejarah panjang (Brodjonegoro et al, 2001: 363; Cummings, 1981: 34). Sebelum membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi, pemerintah Belanda mendirikan beberapa Sekolah Menengah Atas yang fokus mengembangkan keterampilan khusus siswanya seperti *Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) atau sekolah bagi staf lokal pemerintah, Sekolah Menengah untuk Dokter Jawa atau *School ter Opleiding van In Landseche Artsen* (STOVIA) di Batavia tahun 1900, dan Sekolah Dokter Pemerintah Hindia Belanda *Nederlandsch-Indische Artsen School* (NIAS) di Surabaya tahun 1914 (Koentjaraningrat, 1994: 79).

Namun, terkait dengan level institusi pendidikan tinggi pertama di Indonesia, para peneliti memiliki pendapat berbeda; Nizam (2006: 35) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan tinggi pertama adalah Sekolah Dokter Jawa (STOVIA). Begitu pula Brojonegoro (2001: 363) berpendapat bahwa Sekolah Dokter Jawa adalah sebuah institusi pendidikan tinggi karena sekolah itu diperuntukkan bagi siswa pribumi yang telah lulus Sekolah Menengah Atas. Di sisi lain, Koentjaraningrat (1994: 79) menyebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Menengah untuk Pendidikan Dokter Adat atau lebih umum disebut Dokter Jawa atau *School ter Opleiding van In Landseche Artsen* (STOVIA). Dalam hal ini, kita dapat melihat tulisan Nasution (2014) yang menjelaskan bahwa institusi pendidikan tinggi

adalah Sekolah Tinggi Tehnik atau *Technische Hogheschool* yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1920. Dalam hal ini, kita perlu menunjuk dan mempertimbangkan ide-ide Nasution karena tulisannya tentang sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia di era kolonialisme Belanda adalah salah satu tulisan terlengkap yang pernah ditulis (Jalaluddin, 1990: 11; Sirozi, 2004: 18).

Meskipun pemerintah Hindia Belanda sudah mendirikan SMA untuk warga lokal (Indonesia) *Agemeene Middlebare School* (AMS) pada tahun 1919, pemerintah Hindia Belanda belum membuka satu pun lembaga pendidikan tinggi bagi warga lokal waktu itu. Hanya sejumlah kecil orang Indonesia yang mendapat kesempatan langka masuk pada sistem pendidikan Belanda dengan bergabung di SMA kelas atas yang dikhususkan untuk warga negara Belanda, Eropa, dan Kalangan Keraton di *Hogere Burger School* (HBS) yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di universitas-universitas Belanda (Ricklefs, 2011: 239). Pada awal abad ke-20, telah ada beberapa mahasiswa Indonesia yang memiliki minat untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Belanda karena di Indonesia belum ada perguruan tinggi (Koentjaraningrat, 1994: 80).

Pada awalnya, proposal untuk membuka lembaga pendidikan tinggi Indonesia tidak didukung oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia maupun Belanda. Pada tahun 1910, ada sebuah opini publik bahwa Indonesia belum matang untuk pendidikan tinggi karena tidak ada SMA untuk warga pribumi Indonesia yang menjadi sumber mahasiswa. Alasan lainnya adalah Indonesia tidak memiliki suasana intelektual di mana ilmu pengetahuan berasal dan berkembang (Nasution, 2014: 142-143). Serta ada pula keraguan publik yang didasarkan pada rasa pesimis bahwa tidak

akan mungkin pemerintah Hindia Belanda mau mendirikan perguruan tinggi di Indonesia sebagai tanah jajahan, apalagi perguruan tinggi itu akan menjadi tempat belajar bagi warga pribumi. Untungnya, sebagai akibat dari Perang Dunia I yang menyebabkan pabrik-pabrik dan kantor-kantor milik pemerintah Hindia Belanda di Indonesia kekurangan pekerja profesional dan terampil lulusan universitas, maka pemerintah Belanda dengan terpaksa membuka institusi pendidikan tinggi di tanah jajahannya yaitu Indonesia (2014: 142).

Lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Tehnik, *Technische Hogeschool te Bandoeng*, yang didirikan tahun 1920. Sekarang, lembaga pendidikan ini menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Awalnya, Sekolah Tinggi Tehnik Bandung adalah lembaga swasta yang kemudian berubah menjadi lembaga publik atau milik negara (Koentjaraningrat, 1994: 81). Lembaga pendidikan teknik ini didirikan karena situasi dan kondisi waktu itu yang memaksa pemerintah Hindia Belanda yang kekurangan ahli tehnik dan staf lulusan perguruan tinggi. Situasi dan kondisi ini disebabkan oleh terputusnya hubungan Hindia Belanda dengan Negeri Belanda yang diakibatkan oleh gejolak Perang Dunia I. Terputusnya hubungan ini menyebabkan pengiriman tenaga-tenaga ahli lulusan perguruan tinggi dari negeri Belanda tidak bisa datang ke Indonesia untuk bekerja (Nasution, 2014: 142). Pada tahun pertama Sekolah Tinggi Tehnik di Bandung tahun 1920-1921, ada 28 mahasiswa yang terdiri dari 22 orang Belanda, 4 orang keturunan Cina, dan 2 orang mahasiswa warga pribumi. Sayangnya, tidak ada satu pun mahasiswa Indonesia yang lulus pada angkatan pertama ini. Dari 12 orang lulusan pertama, mereka terdiri dari 9 Belanda dan 3 Cina. Ada 4 lulusan Indonesia pada periode perkuliahan antara tahun

1925-1926. Salah satu lulusannya adalah Soekarno yang adalah presiden Indonesia pertama (2014: 144).

Selanjutnya, akibat mendesaknya jumlah kebutuhan pengacara dan adanya kesulitan untuk menarik pengacara Belanda untuk bekerja di Indonesia menyebabkan pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah hukum atau *Rechtshoogeschool* pada tahun 1924 di Jakarta. Sekarang, sekolah hukum ini menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian, untuk mencapai kurangnya dokter di Indonesia, Sekolah untuk Ilmu Kedokteran *Geneeskundige Hogeschool* didirikan pada tahun 1927 di Batavia yang menggantikan Sekolah Dokter *Jawa School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* (Koentjaraningrat, 1994: 79; Ricklefs, 2011: 240; Nasution, 2014: 144). Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda juga membuka Akademi Administrasi *Bestuurs Academie* pada tahun 1938. Kemudian, pada tahun berikutnya, pemerintah Hindia Belanda mempunyai rencana untuk membuka sebuah universitas di Indonesia pada tahun 1939. Untuk mewujudkan rencana mereka, pemerintah Hindia Belanda berencana menyatukan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada seperti Sekolah Teknik di Bandung, Sekolah Hukum, dan Sekolah Kedokteran di Jakarta. Pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Hindia Belanda juga membuka Fakultas Sastra *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* pada tahun 1940 di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selain itu, juga dalam waktu yang tidak jauh berbeda, pada tahun 1941, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Fakultas Pertanian di Bogor *Faculteit der Landbouwwetenschap* yang sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Sayangnya, sebelum pemerintah Hindia Belanda menerapkan rencana mereka untuk membuat sebuah Universitas yang utuh di Indonesia, perang Pasifik yang menjadi bagian

Perang Dunia II berkecamuk sekaligus merusak rencana pendirian sebuah universitas tersebut (Koentjaraningrat, 1994: 82).

Di era kekuasaan Hindia Belanda ini, sekolah-sekolah dan sekolah tinggi setingkat universitas memang telah banyak dibangun. Bahkan untuk sekolah-sekolah tertentu yang dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga Belanda yang pejabat, keluarga Eropa yang mempunyai kedudukan penting, dan keluarga pribumi keturunan raja dan keluarga keraton adalah sekolah yang mempunyai kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri Belanda karena sekolah tersebut menggunakan standar yang sama dengan yang digunakan di sekolah-sekolah di negeri Belanda yang terkenal mempunyai aturan yang sangat ketat. Anak-anak yang lulus dari sekolah elit yang menggunakan standar Belanda ini dapat melanjutkan ke tingkat universitas di negeri Belanda tanpa melalui tes lagi. Sekolah elit tersebut salah satunya adalah *Hogere Burger School (HBS)*. Namun begitu, di sisi lain, sebagai negara kolonial yang menjajah daerah jajahan, sejatinya pemerintah Hindia Belanda menerapkan model dan system pendidikan kolonial yang mana karakter utama pendidikan kolonial adalah mempraktekkan model-model pendidikan diskriminatif yang mana ada banyak model sekolah yang dipilah-pilah menurut golongan suku, agama, ras, dan status sosial. Kebijakan sekolah yang segregatif yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memang adalah karakter utama model pendidikan kolonial yang juga diterapkan oleh para penjajah kolonial lain di wilayah dan negara yang berbeda. Tujuannya tentu untuk menjaga agar pemerintah kolonial tetap kuat dan warga jajahan tetap terpisah-pisah dan lemah. Karakter penting lain dari model pendidikan kolonial adalah penyelenggaraan pendidikan termasuk

pendidikan tinggi adalah tidak benar-benar berniat untuk memajukan dan meningkatkan wawasan warga jajahan, melainkan hanyalah sebuah cara untuk memproduksi tenaga kerja teknis yang murah yang siap untuk melayani penguasa kolonial. Begitu pula terkait dengan usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di era Hindia Belanda yang mana usaha tersebut juga bukan untuk membangun kualitas sumberdaya manusia warga jajahan. Pendirian perguruan tinggi juga bukan untuk membangun kegiatan-kegiatan akademis ilmiah seperti penelitian dan kegiatan akademis lainnya sebagaimana fungsi dari perguruan tinggi di negeri Belanda melainkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Pendidikan Tinggi di Era Penjajahan Jepang

Sebelum Perang Dunia II benar-benar berhenti, Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1941 sampai 1945. Tiga setengah tahun era pendudukan Jepang di Indonesia merupakan periode penentu dalam Sejarah Indonesia (Ricklefs, 2011: 297). Dalam mengembangkan pendidikan, tujuan utama dari pendidikan zaman Jepang adalah untuk memenangkan perang terhadap sekutu dengan menyediakan pekerja bebas rendah (Romusha) dan prajurit Indonesia yang mendukung kebutuhan militer Jepang. Siswa harus mengikuti pelatihan fisik, militer dan indoktrinasi dari tentara Jepang (Setiadji, 1976: 30; Moestoko et al, 1986: 138). Melalui pendidikan, pemerintah militer Jepang di Indonesia meminta masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dengan orang-orang Jepang untuk mencapai tujuan perang Jepang yang disebut *Hakko Ichiu* atau "Area Kemakmuran untuk Asia Timur". Pada era Jepang ini, rakyat pribumi menjadi sangat miskin dan menderita (Moestoko et al, 1986: 137).

Di era penjajahan Jepang, hampir semua institusi pendidikan tinggi ditutup, tetapi hanya Sekolah kedokteran *Ika Dai Gakko* yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta dan Sekolah Tinggi Tehnik *Kogyo Dai Gakko* yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung di Bandung tetap dibuka. Jepang juga mendirikan lembaga pendidikan baru yaitu Sekolah Staf Administrasi atau *Kenkoku Gakuin* di Jakarta dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor (Moestoko et al, 1986: 139). Kebijakan menutup dan mendirikan institusi pendidikan tinggi ini ada karena pemerintah militer Jepang memanfaatkan pendidikan tinggi sebagai instrumen propaganda untuk mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur melawan sekutu (Salim, 2007: 213). Akan tetapi, terkait situasi sejarah pendidikan tinggi di era pendudukan pemerintahan militer Jepang ini, informasi dan sumber sejarah yang tersedia umumnya sangat terbatas karena Jepang menduduki Indonesia dalam waktu yang sangat singkat yaitu tiga setengah tahun.

Pada kenyataannya, pemerintah militer Jepang juga menerapkan prinsip kolonisasi yang sama dengan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa tujuan dari pendudukan Jepang adalah untuk memenuhi kebutuhan perang tentara Jepang dan memperluas wilayah jajahan (Ricklefs, 2011: 300). Namun begitu, ada sedikit dampak positif untuk masa depan pembangunan pendidikan di Indonesia dan revolusi kemerdekaan yang mana ada beberapa orang Indonesia, sebagian besar mantan guru di era Hindia Belanda telah ditunjuk oleh pemerintahan militer Jepang untuk berada di pos tertinggi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda yang sebelumnya diduduki oleh orang-orang Belanda. Dari kondisi ini, orang-orang Indonesia dapat belajar bagaimana mengelola kantor-kantor pemerintah dan perusahaan yang kesempatan seperti itu tidak pernah didapat di era Hindia Belanda.

Kemudian, di era ini, warga pribumi dapat bergabung dengan organisasi militer bentukan pemerintah Miiter Jepang. Pemerintah militer Jepang memberi pelatihan tata cara bertempur dan seni bela diri untuk anak muda Indonesia. Kebijakan ini sangat penting bagi masa depan revolusi Indonesia dalam menentang kolonialisme Hindia Belanda yang mana mereka kembali lagi ke Indonesia setelah Jepang kalah dan menyerah pada Sekutu (Moestoko et al, 1986: 141). Anak-anak muda Indonesia yang berusia antara 14 sampai 25 tahun diperkenankan bergabung dengan organisasi semi militer yang disebut *Seinendan* sejak bulan April 1943. Untuk mereka yang berusia 25 sampai 35 tahun, mereka wajib bergabung dengan pasukan kewaspadaan yang disebut *Keibodan* yang bertugas menjadi polisi, pemadam kebakaran, dan pendukung untuk angkatan udara Jepang. Sementara itu, tentara pendukung yang terdiri dari para anak muda pribumi bertugas untuk mendukung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang disebut *Heiho* yang berdiri tahun 1943. Ada sekitar 25 ribu anak muda Indonesia yang menjadi anggota *Heiho* dan mendapat pelatihan militer dasar yang sama seperti yang diberikan kepada tentara Jepang (Ricklefs, 2011: 305). Selanjutnya, pada bulan Oktober 1943, Jepang mendirikan organisasi pemuda Indonesia yang diberi nama Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) atau disebut juga Pasukan Penjaga Negara atau Giyugun. Anggota pasukan ini adalah para mantan guru, staf pemerintah era Hindia Belanda, tokoh pemimpin Islam atau kyai, dan beberapa mantan tentara Belanda di Indonesia. Para anggota PETA kebanyakan pejuang aktif dalam revolusi Indonesia melawan aliansi dan tentara Belanda setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Komandan militer Indonesia pertama, Jenderal Sudirman, adalah anggota dari Giyugun dan guru di era Hindia Belanda dan Jepang (2011: 308).

Di era penjajahan Jepang ini, usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan tinggi sangat buruk. Hampir pasti tidak ada usaha maksimal untuk mengarahkan pendidikan tinggi menjadi lebih baik daripada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di era ini, banyak sekolah tinggi ditutup dan kondisi infrastruktur sekolah sangat buruk, banyak gedung sekolah tidak terawat dan terancam rusak. Kondisi ini terjadi karena Jepang menduduki wilayah nusantara atau Indonesia memang untuk dijajah dan untuk menjadikannya sebagai sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia untuk mendukung dan mensukseskan perang Jepang melawan sekutu. Namun begitu, ada sisi positif yang secara tidak langsung didapat oleh warga pribumi khususnya terkait kesempatan bersekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di era Jepang ini, pemerintahan militer Jepang menghapus aturan-aturan yang sifatnya diskriminatif dihapus. Aturan yang diskriminatif seperti anak-anak dari kalangan suku, ras, agama, dan status sosial tertentu dapat masuk ke sekolah-sekolah khusus yang berkualitas baik kini telah ditiadakan. Semua penduduk pribumi usia sekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah mana saja. Hal lain yang menjadi keuntungan bagi warga pribumi adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan formal yang mana di era Hindia Belanda, bahasa Indonesia hanya menjadi bagian kecil dari materi pelajaran bahasa, bukan sebagai bahasa pengantar proses pembelajaran. Namun begitu, secara keseluruhan, kualitas pendidikan khususnya pendidikan tinggi sangat buruk bila dibandingkan dengan kondisi semula di era pemerintahan Hindia Belanda.

Pendidikan Tinggi di Era Sukarno

Kondisi pendidikan tinggi di era Soekarno tidak berkembang dengan baik karena era ini adalah masa peralihan dari zaman penjajahan Jepang. Sementara, pada saat itu penjajah Belanda mencoba menduduki Indonesia lagi yang mana mereka telah mendarat dan menduduki lagi beberapa daerah di Indonesia setelah Jepang pemerintah militer menyerah kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Situasi ini tentunya mempengaruhi kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang mana pada saat itu pendidikan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua bagian; beberapa lembaga pendidikan tinggi berada di bawah payung pemerintah Hindia Belanda dan sebagian lain berada di bawah naungan pemerintah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda berhak mengembangkan Sekolah Kedokteran *Daigaku Ika* yang ditinggalkan pemerintah Militer Jepang menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran. Kemudian Sekolah Hukum, Sastra dan Filsafat di Jakarta juga berada di bawah pengelolaan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1946 (Moestoko et al, 1986: 163). Beberapa sekolah tinggi ditutup sebelum aksi militer tahun 1947, namun Nood-Universiteit atau "Universitas Darurat" dibuka pada bulan Januari 1946 oleh pemerintah *Hindia Beland*. Universitas Darurat ini terdiri dari beberapa fakultas seperti Medis, Hukum, Sastra, Filsafat, dan Pertanian yang berlokasi di Jakarta dan fakultas Teknik di Bandung. Nama Universitas Darurat diubah menjadi *Universiteit van Indonesie* atau Universitas Indonesia pada bulan Maret 1947 (Moestoko et al, 1986: 164). Pada tahun 1948, Universitas Indonesia memiliki fakultas yang lebih luas dari sebelumnya yang berlokasi di beberapa kota yang berada di bawah otoritas pemerintah Hindia Belanda. Fakultas Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Sastra dan Filsafat berada di

Jakarta, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Alam berlokasi di Bandung, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan berada di Bogor, Fakultas Ekonomi berada di Makassar, dan Fakultas Kedokteran juga ada di Surabaya (1986: 165).

Sementara itu, di wilayah Republik Indonesia, ada beberapa lembaga pendidikan tinggi yang juga tersebar di beberapa kota seperti Universitas Gadjah Mada dengan dua fakultas; Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra dan Filsafat, Sekolah Tinggi Islam Indonesia atau Institut Agama Islam Indonesia dengan empat fakultas seperti Teologi, Pendidikan, Hukum dan Ekonomi, serta Sekolah Tinggi Teknik atau Lembaga Teknis dengan tiga departemen seperti Sipil, Elektro, dan Kimia Rekayasa dan Akademi Politik, dan Akademi Polisi semuanya berada di Yogyakarta. Sementara Sekolah Tabib Tinggi atau lebih dikenal sebagai Sekolah Kedokteran, Institut Farmasi, dan Institut Pertanian berlokasi di Klaten, dan Program Doktor dari Sekolah Kedokteran berada di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, setelah pemerintah Hindia Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1950, beberapa lembaga dan akademi yang sebelumnya berada di bawah naungan dua pemerintahan yang berbeda kemudian digabung menjadi satu lembaga. Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Kedokteran, Sekolah Tinggi Farmasi, Institut Pertanian dan Akademi Politik digabung menjadi Universitas Gadjah Mada dan Akademi Polisi dipindah ke Jakarta dengan nama Institut Ilmu Kepolisian (1986: 163-164).

Meski kondisi pembangunan pendidikan di awal kemerdekaan kurang begitu bagus, hal tersebut dapat dimaklumi karena usia negara waktu itu masih sangat muda dan baru saja terlepas dari cengkeraman penjajahan. Namun demikian, ada beberapa poin penting yang harus digarisbawahi

di era Sukarno ini yaitu telah dibangunnya sekolah-sekolah umum di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia dan juga telah dibangunnya beberapa perguruan tinggi di hampir setiap provinsi di Indonesia (Thomas, 1973: 216; Cummings, 1981: 42). Kira-kira ada sekitar 23 perguruan tinggi negeri dan beberapa lembaga pelatihan guru yang telah dibangun di 26 provinsi di Indonesia. Sehingga pada tahun 1960, semua provinsi di Indonesia telah memiliki lembaga pendidikan tinggi (Nizam, 2006; 35).

Pada era Sukarno ini, pemerintah Indonesia juga menjalankan program yang mewajibkan anak-anak usia 6 tahun untuk masuk sekolah dasar (Setijadi, 1976: 45). Di era ini, sudah ada tiga jenjang pendidikan formal yaitu Sekolah Rendah 6 Tahun (SR), Sekolah Menengah Pertama 3 Tahun (SMP), Sekolah Menengah Pertama 3 Tahun (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT). Di era Sukarno ini semua anak bangsa mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan kapasitas dan prestasi mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Di era ini tidak ada lagi segregasi siswa sekolah yang didasarkan pada latar belakang kultural siswa seperti ras, etnis, agama, dan asal negara sebagaimana yang telah diterapkan dalam system pendidikan kolonial pemerintah Hindia Belanda. Semua siswa dari berbagai latar belakang keluarga sosial seperti petani, pedagang kecil dan besar, pegawai negeri, tentara dan lain-lain memiliki kesempatan yang sama untuk pergi ke sekolah umum (Moestoko et al, 1986: 150-151; Setijadi, 1976: 45).

Kondisi pendidikan tinggi di era Sukarno memang dapat dikatakan tidak secepat ketika perguruan tinggi-perguruan tinggi itu dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda karena kualitas sumberdaya manusia SDM dan kekuatan dukungan finansial pemerintah Indonesia pada waktu itu jauh berada di bawah kualitas SDM dan kekuatan

keuangan pemerintah Hindia Belanda. Kondisi ini disebabkan oleh situasi di mana setelah Indonesia benar-benar terlepas dari agresi militer Belanda dan Sekutu, kondisi perekonomian Indonesia benar-benar memburuk. Terkait dengan kualitas SDM, harus diakui hanya sedikit warga pribumi yang mempunyai kesempatan untuk sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada tingkat sarjana apalagi pasca sarjana waktu itu sehingga tidak siap untuk menjadi staf pengajar yang handal dan berkualitas serta tidak siap untuk mengelola sebuah perguruan tinggi. Sejujurnya, dapat dimengerti bahwa kualitas SDM warga negara Belanda berada jauh di atas kualitas SDM warga negara Indonesia karena warga negara Belanda di Indonesia maupun di Belanda selalu mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dari warga pribumi yang menjadi warga jajahan mereka. Kondisi keuangan mereka juga sangat diuntungkan sebagai bangsa penjajah, dengan begitu mereka dapat membangun negaranya termasuk dalam meningkatkan kualitas SDM nya dengan baik. Sebaliknya, kondisi yang sangat buruk dialami oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. Jadi, kondisi ini dapat dimaklumi ketika kualitas pendidikan secara umum dan khususnya kualitas pendidikan tingginya waktu itu mengalami kemunduran karena masa ini adalah masa peralihan dari penjajahan Belanda ke masa awal kemerdekaan.

Pendidikan Tinggi di Era Suharto

Di era Suharto, pendidikan tinggi telah berkembang cepat, pemerintah telah berusaha menambah lembaga pendidikan tinggi secara terus menerus. Hampir semua provinsi di era Suharto memiliki lembaga pendidikan tinggi, bahkan di beberapa provinsi, salah satu kota memiliki lebih dari tiga lembaga pendidikan tinggi (Basundoro: 2012). Pada awal 1970-an, telah ada 40 perguruan tinggi negeri di seluruh

provinsi (Moestoko et al, 1986: 281). Kemudian, di akhir kekuasaan Suharto pada tahun 1990-an, ada 27 provinsi di Indonesia dengan 49 perguruan tinggi negeri dan 915 lembaga pendidikan tinggi swasta (Tilaar dan Suryadi, 1994: 181).

Sayangnya, di era ini juga, keadaan lembaga pendidikan tinggi itu berada dalam kondisi yang memperhatikan. Lembaga pendidikan tinggi yang telah menjadi tempat untuk menanamkan idealisme dan nasionalisme di era Sukarno antara tahun 1945 hingga tahun 1960, di era Suharto berubah menjadi sebuah institusi yang berada dalam rutinitas yang membosankan. Namun, meskipun kondisi pendidikan tinggi waktu itu memang nyata-nyata memperhatikan, banyak staf pengajar di perguruan tinggi Indonesia merasa bahwa mereka telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebagian besar staf pengajar merasa puas pada kondisi universitas mereka dan juga pada karya-karya mereka. Hanya sedikit staf akademis yang mempunyai pandangan berbeda dan mengakui bahwa kondisi perguruan tinggi mereka berada dalam taraf yang memperhatikan dan menyadari bahwa mereka perlu melakukan terobosan yang fundamental untuk membangun perguruan tinggi mereka agar menjadi lebih baik kualitasnya (Cummings, 1981: 34-35).

Pada akhir 1970, jumlah dosen sangat terbatas. Rasio dosen-mahasiswa waktu itu hanya 1: 1, 4 yang berarti jumlah dosen di sebuah perguruan tinggi negeri tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa. Apalagi ketika dilihat dari rasio perbandingan antara jumlah dosen senior dan profesor dengan dosen junior dan asisten dosen di mana persentase profesor dan dosen senior waktu itu adalah 6,5% di antara 8.500 dosen yang ada waktu itu (Priyono dan Pranarka, 1979: 62). Untuk mengembangkan kualitas dan

pengalaman internasional dosen di institusi pendidikan tinggi negeri, pemerintah membuat program program 400 Doktor (PhD) untuk memenuhi kebutuhan dosen dengan kualifikasi doktor untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 1974. Kebijakan ini menjadi pelopor berdirinya program-program pasca sarjana di Indonesia (Markum, 2007: 37). Sayangnya, program ini tidak dapat memperbaiki kualitas dosen secara signifikan pada waktu itu. Masalah yang terkait dengan rendahnya mutu dosen ini menyebabkan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya memiliki beberapa kelemahan akademis seperti para mahasiswa itu hanya mendapat pendidikan minimal, kurang pengetahuan dasar terutama kemampuan untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, miskin keterampilan bahasa internasional, tidak tahu literatur internasional yang berhubungan dengan studi mereka (Cummings 1981: 35). Para alumni pendidikan tinggi khususnya pada program sarjana sebagian besar belum mempunyai kepribadian yang kuat dan moralitas yang identik dengan kemampuan intelektual yang mana keduanya seharusnya seimbang dimiliki oleh seorang sarjana (Priyono dan Pranarka, 1979: 59; Cummings, 1981: 35).

Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya nyata seperti perbaikan fasilitas fisik perguruan tinggi negeri dan mengembangkan kualitas penelitian dan pendidikan, tetapi upaya tersebut tidak cukup untuk memperbaiki kualitas staf pengajar yang miskin nilai-nilai pendidikan dan motivasi untuk memajukan dunia pendidikan pada waktu itu. Sayangnya, upaya pemerintah tersebut juga tidak dapat menghindarkan mahasiswa baru dari masalah yang sama. Dilihat dari kondisi ini, pendidikan tinggi Indonesia di awal 1980-an benar-benar di bawah standar (Cummings, 1981: 47-48).

Dalam upaya untuk mengembangkan kualitas lembaga pendidikan tinggi, Suharto membuat Program inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara mendasar yang disebut Kerangka Dasar Pengembangan Perguruan Tinggi (KDPPT) yang diikuti dengan program Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP I). Pada periode pertama yang diterapkan antara tahun 1975-1985, KPPTJP ini berusaha membangun sinergisitas hubungan antara pendidikan tinggi dengan institusi-institusi pemerintah lainnya serta dengan institusi-institusi swasta. Dalam program ini, pemerintah juga menerapkan 3 program pendidikan tinggi seperti Diploma, Sarjana / Sarjana, dan Program Pascasarjana. Pengembangan organisasi, aspek manajemen termasuk penyelesaian sistem kredit, evaluasi akademik mahasiswa, beban perkuliahan mahasiswa dan sistem untuk promosi staf pengajar juga mulai diterapkan. Selanjutnya, dalam KPPTJP II di 1986-1995, pemerintah fokus untuk meningkatkan prestasi sebelumnya dari KPPTJP I. Sayangnya, krisis ekonomi dunia yang juga melanda Indonesia serta jatuhnya harga minyak menyebabkan situasi ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil yang memberikan dampak negatif terhadap program KPPTJP II seperti jumlah pendaftaran jumlah calon mahasiswa mengalami penurunan. Setelah itu, KPPTJP III dimulai 1996-2005 (DIKTI, KPPTJP IV, 2003: 1). Program ini didasarkan pada manajemen yang dinamis dari usaha pembangunan kualitas pendidikan tinggi yang cocok dengan dinamika sosial, ekonomi dan perubahan politik. Sayangnya, karena krisis ekonomi pada tahun 1997 yang diikuti oleh krisis sosial dan politik di Indonesia, KPPTJP III tidak berhasil dilaksanakan karena setelah reformasi, sistem pemerintah di Indonesia telah berubah dari model sentralistik ke model desentralistik di mana KPPTJP III adalah

program yang sentralistik (2003: 1). Selanjutnya, KPPTJP IV yang akan dimulai 2003-2010 dirancang untuk membuat lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga yang memajukan daya saing bangsa dan untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Indonesia agar menjadi organisasi yang sehat. Untuk mensukseskan rencana ini, pengembangan sistem pendidikan tinggi sebaiknya didasarkan pada tiga visi penting seperti kualitas, akses, dan ekuitas sebagaimana yang menjadi tiga tujuan pokok dari KPPTJP IV yang mana berdasarkan visi KPPTJP IV yang dirancang beberapa tahun setelah runtuhnya rezim Soeharto, maka tampak bahwa program pemerintah Soeharto pada KPPTJP I sampai KPPTJP III memiliki banyak masalah yang bertentangan dengan visi KPPTJP IV (DIKTI, KPPTJP IV, 2003: 2).

Menilik situasi yang terjadi di era pemerintahan Suharto yang sentralistik, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mungkin pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi di era Suharto memang lebih baik bila dibandingkan dengan era Sukarno yang pada waktu itu di mana kondisi perekonomian negara sangat buruk, akan tetapi dilihat dari kualitas akademis, kondisinya tidak jauh berbeda. Rendahnya kualitas dosen, rendahnya mutu lulusan, dan minimnya penelitian dan karya tulis yang berkualitas yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia di era Suharto menjadi bukti adanya banyak masalah yang belum terselesaikan dalam membangun pendidikan tinggi.

Pendidikan Tinggi di Era Reformasi

Dalam era reformasi ini, usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi dengan cara membangun dan menerapkan reformasi

struktural di perguruan tinggi adalah tujuan utama dari reformasi pendidikan tinggi di Indonesia (Nizam, 2006: 39). Sekarang ini, pendidikan tinggi di Indonesia telah melakukan langkah maju semenjak mengacu pada UU Nomer 15 tahun 1961 (OECD, 2015: 184). Sementara pemerintah demokratis sipil yang baru yang menggantikan pemerintah yang otoriter telah berada di masa transisi untuk mengembangkan masyarakat demokratis yang ideal yang didasarkan pada partisipasi masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat menjadi kekuatan moral yang kredibel untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tujuan utama reformasi pendidikan tinggi di Indonesia, sistem pendidikan tinggi nasional dan sistem universitas harus bertanggung jawab pada publik dengan menempatkan efisiensi yang kuat dan transparansi dalam manajemen, meningkatkan kualitas pengajaran dan program belajar, serta meningkatkan kualitas program pascasarjana, dan menyajikan standar kualitas yang diterima oleh masyarakat (Moeliodihardjo et al, 2001: 389; Nizam, 2006: 39). Saat ini, Indonesia memiliki beragam sistem pendidikan tinggi (OECD, 2015: 185; Depdikbud, 2013: 71). Ada 5,4 juta siswa yang dilayani oleh 36000 lembaga pendidikan tinggi (Depdikbud, 2013: 71; ACDP, 2013: 19). Enam jenis lembaga pendidikan tinggi yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 pasal 59 seperti universitas, institut, akademi, politeknik, dan akademi komunitas.

Pengembangan dan pelaksanaan demokratisasi di semua sistem pemerintahan termasuk pendidikan tinggi telah dilakukan di era reformasi ini. Itu bukan hanya karena runtuhnya rezim Soeharto tetapi juga tuntutan global dan lokal (Azra, 2000; Raihani 2007: 174). Dalam menanggapi

kebutuhan pembangunan desentralisastik, pemerintah merilis Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25/1999 yang menekankan keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat yang sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah daerah (Moeliodihardjo 2001: 391). Selanjutnya, salah satu hal penting yang harus diambil dalam prioritas untuk membuat pengembangan demokratisasi berhasil adalah mengembangkan dan menerapkan desentralisasi sistem pendidikan tinggi dan otonomi kampus kampus. Sayangnya, sistem kebijakan pendidikan tinggi belum berubah, meskipun kebijakan dan manajemen pendidikan secara umum didesentralisasikan ke pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi pada tahun 2001 (Rosser, 2015: 5). Hukum Pemerintah atau PP Nomor 25/2000 masih disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi masih dikelola oleh pemerintah pusat (Moeliodihardjo, 2001: 391). Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Depdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Agama (Depag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DGIHE), dan departemen lain yang memiliki lembaga pendidikan tinggi terus mengontrol koordinasi dan pengawasan semua lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta di bawah payung mereka.

Kondisi program desentralisasi lembaga pendidikan tinggi umum tidak berjalan dengan baik karena kebanyakan semua masyarakat institusi pendidikan tinggi masih tergantung langsung pada pemerintah pusat khususnya pada pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) karena sebagian besar staf akademik dan administrasi adalah PNS, dan mereka juga tergantung pada Departemen Keuangan yang memberikan mereka

dana untuk operasional mereka, dan mereka juga tergantung pada beberapa departemen lain dan kementerian (Rosser, 2015: 5). Situasi ini disebabkan lembaga pendidikan tinggi publik di Indonesia tidak dapat mengambil tindakan untuk bereaksi melakukan perubahan eksternal yang cepat karena mereka dipenjarakan oleh otoritas birokrasi yang terpusat. Hal ini membuat perguruan tinggi negeri merasa bahwa mereka bertanggung jawab ke pemerintah pusat tidak kepada publik (Nizam, 2006: 37).

Dalam kaitan dengan program desentralisasi pendidikan tinggi Indonesia, program otonomi kampus sangat signifikan untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia memiliki arti penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, akan tetapi yang terjadi adalah perguruan tinggi di Indonesia mempunyai respon yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi tak lain karena kurangnya otonomi pada perguruan tinggi itu sendiri (Nizam, 2006: 37).

Pada dasarnya, gagasan otonomi kampus itu sudah ada hampir sembilan tahun sebelum era Suharto yang militeristik dan sentralistik itu runtuh. Ide Orde Baru pada otonomi pendidikan tinggi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan tinggi diterapkan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi pengetahuan dan ayat 2 menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat organisasi pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Sayangnya, peraturan ini jelas diabaikan oleh pemerintah Suharto (Rosser, 2015: 10). Kemudian, lima tahun setelah runtuhnya

Soeharto, pemerintah merilis Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 yang memberikan dukungan terhadap pentingnya penerapan otonomi kampus sebagai faktor signifikan dalam melaksanakan desentralisasi. Selanjutnya, pemerintah mendukung pelaksanaan otonomi kampus untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan tinggi dengan merilis UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 62, 63, 64 dan 65 yang intinya secara umum memerintahkan penerapan desentralisasi kampus.

Namun dalam kenyataannya, melaksanakan otonomi kampus sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 12/2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi pada pasal 62, 63, 64 dan 65 tidak lah mudah. Masalahnya adalah semua itu bertentangan dengan kondisi yang ada di mana status para dosen di perguruan tinggi negeri yang pada umumnya pegawai negeri dan struktur institusi pendidikan tinggi yang menjadi bagian langsung dari kementerian yang menaunginya membuat lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia mengalami kesusahan untuk menerapkan desentralisasi kampus. Hal ini kemudian juga membuat kampus tidak merasa bertanggungjawab kepada publik tapi kepada pemerintah pusat.

Kesimpulan

Pendidikan tinggi di Indonesia tidak mempunyai sejarah yang panjang adalah realita yang harus diterima oleh bangsa ini khususnya para pemerhati pendidikan. Kesadaran bahwa pendidikan tinggi di Indonesia kualitasnya kurang baik baru muncul kurang lebih pada 15 sampai 20 tahun terakhir ini ketika persinggungan dengan dunia luar dapat dilakukan dengan semakin mudah. Sebelumnya, publik merasa bahwa pendidikan tinggi di negeri ini sudah baik,

namun kenyataannya dalam ranking pendidikan tinggi dunia dalam tiga tahun terakhir ini yang dirilis menurut *Times Higher Education*, tidak ada satu pun perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang menempati posisi di bawah 500 terbaik dunia. Belajar dari sejarah yang ada akan menjadi penting bahwa pendidikan tinggi di Indonesia adalah masih dalam usia yang sangat muda. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan wajar ketika kualitas pendidikan tinggi di negeri ini masih tertinggal dengan negara lain. Sejarah mau tidak mau telah menjadi bagian penting yang membentuk karakter pendidikan tinggi Indonesia kini. Pemerintah kolonial Belanda telah member karakter yang sangat teknis dan prosedural birokratis yang ketat dan minim nilai-nilai kebebasan akademis pada pendidikan Indonesia. Sementara pemerintahan militer Jepang hampir pasti tidak mewariskan unsur-unsur penting dalam pengembangan perguruan tinggi di negeri ini karena mereka lebih mementingkan melatih para mahasiswa dan pemuda untuk menjadi tentara yang akan menyokong perang melawan sekutu. Kemudian pemerintahan Sukarno yang menjadi pelopor awal pembangunan perguruan tinggi pasca penjajahan tidak mampu berbuat banyak karena terkendala keterbatasan-keterbatasan. Sedang, pemerintahan Suharto justru lebih banyak terjebak pada pembangunan kuantitas dari pada kualitas pendidikan tinggi. Dan realitas bahwa pemerintahan di era reformasi yang justru mengalami kesusahan untuk terlepas dari karakter-karakter historis yang dialami oleh pendidikan tinggi di negeri ini. Mungkin, penerapan desentralisasi perguruan tinggi yang serius akan dapat membantu sedikit demi sedikit pengembangan perguruan tinggi di negeri ini untuk menjadi lebih baik.

Referensi

- Barnadib, Sutari Imam. (1983). *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Brodjonegoro, et al, (2001) *Implementasi Paradigma Baru di Perguruan Tinggi* dalam Jalal dan Supriadi (2001) *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Depdiknas-Bappenas-Adi Cita Karya Nusa
- Buchori, Mochtar and Malik, Abdul. (2004) *the Evolution of Higher Education in Indonesia* in Altbach and Umakoshi (2004) *Asian Universities: Historical Perspective and Contemporary Challenges*. The Johns Hopkins University Press.
- Cummings, K. William (1981). *Pendidikan Tinggi dan Masyarakat Indonesia*. Prisma. LP3ES.
- Koentjaraningrat. (1983). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa: Seri etnografi Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, S. (2014). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mestoko, Sumarsono, et.al. (1986). *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nizam. (2006) *Indonesia in UNESCO (2006) Higher Education in South East Asia*. UNESCO and APEID.
- Poerbakawatja, Soegarda. (1970). *Pendidikan dalam alam Indonesia merdeka*. Djakarta: Gunung Agung.
- Purwadi, Agung. (2001) *Impact of the Economic Crisis on Higher Education in Indonesia* in Varghese (2001) *Impact of the Economic Crisis on Higher Education in east Asia: Country Experiences*. International Institute for Education Planning.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka, A.M.W. (1979). *Situasi pendidikan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir*. Jakarta: CSIS.
- Ricklefs, M.C. (2011). *Sejarah Indonesia modern*. Yogyakarta: 153